

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Dye, T. R. (2002). Understanding Public Policy. Pearson.
- Indra, M. (2019). Implementasi Kebijakan Publik. Medan: Medan Persada.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press.
- Pramono, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tahir, A. (2021). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, R. (2021). Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan. Bandung: CV. Mandiri.
- Wibawa, S. (2012). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Ilmiah.

### **Jurnal**

- Amzar, A. (2016). "Penerapan kualitas pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." *Jurnal JOM FISIP*, 3(1).
- Hasyem, M., Larasati, E., Suwitri, S., & Warsono, H. (2022). "Implementasi penyaluran dan penetapan dana desa (studi kasus di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(2), 527–544.
- Laila, A., HB, G., & Zulwisman. (2024). "Implementasi pelayanan publik pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 111–122.
- Lestari, M. (2022). "Hambatan implementasi kebijakan pembuatan E-KTP di daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–55.
- Sebayang, S. D. D. B. R. (2023). "Faktor penyebab keterlambatan pembuatan E-KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 67–78.
- Suryanto, T. (2015). Efektivitas pelaksanaan kebijakan program KTP elektronik di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 101–112.

### **Skripsi**

- Girsang, V. S. (2024). Kualitas pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Skripsi, Universitas Medan Area.
- Mahfudl. (2022). Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)

- pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Putera, P. E. (2020). Implementasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pembuatan E-KTP Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi, Universitas Islam Riau.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kementerian Dalam Negeri. (2011). Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.
- Kementerian Dalam Negeri. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018.
- Kementerian PANRB. (2017). Keputusan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
- Pemerintah Kabupaten Simalungun. (2022). Peraturan Bupati Simalungun No. 9 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perekaman dan Pencetakan E-KTP.
- Kementerian Dalam Negeri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Teknologi Biometrik.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Berita Online
- Go Sumut. (2023). "Praktik pungutan liar dalam pelayanan publik di Indonesia." Diakses dari <https://gosumut.com>.
- Tribun Medan. (2023). "Laporan praktik pungli dalam perekaman data E-KTP." Diakses dari <https://medan.tribunnews.com>